

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dinamika hubungan internasional telah mengalami transformasi signifikan dari paradigma *high power* yang berpusat pada kekuatan negara menjadi *low power* yang menekankan pada isu-isu ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, olahraga, dan pariwisata. Permasalahan keamanan kesehatan masih menjadi perhatian utama di seluruh dunia. Beberapa penyakit menular seperti Zika, Ebola, Sindrom Pernapasan Timur Tengah, dan penyakit zoonosis seperti flu burung, atraks, leptospirosis berdampak signifikan terhadap *human security*, bahkan berpengaruh terhadap perekonomian negara (DFAT *Australian Government*, 2020). WHO mencatat bahwa sekitar 60% dari penyakit infeksius pada manusia berasal dari hewan, dan lebih dari 70% penyakit menular yang baru muncul (emerging infectious diseases) bersifat zoonotik (WHO, 2022). Melalui data tersebut, WHO bersama FAO dan WOAHA telah dikembangkan The Tripartite Zoonoses Guide (TZG) untuk mendukung negara-negara dalam mengambil pendekatan multisektoral “*One Health*” untuk mengatasi penyakit zoonosis (WHO, n.d.).

Dalam skala global, Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 195 negara dengan *index score* 50,4 poin berdasarkan laporan Global Health Security Index (GHSI) (GHS Index, n.d.). Index tersebut dipengaruhi oleh kelemahan pencegahan dan persebaran penyakit yang salah satunya ditularkan melalui hewan. Sejak tahun 2020, Indonesia menghadapi tantangan dari zoonosis seperti

rabies dan leptospirosis, yang menular dari hewan ke manusia melalui gigitan atau kontak dengan cairan tubuh (dhis2, 2023). Selain itu, penyakit hewan ternak seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan LSD (*Lumpy Skin Disease*) telah merusak industri peternakan, menginfeksi puluhan ribu hewan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Pada Desember 2024–Januari 2025, Indonesia mengalami gelombang PMK. Lebih dari 14.630 ternak terinfeksi, dengan 338 kematian sejak Desember 2024 (Kurniawati, 2025).

Tantangan inilah yang membuat pemerintah melihat perlunya kerjasama dengan pihak asing untuk mengatasi permasalahan ternak. Pemerintah Indonesia dan Australia meluncurkan kerja sama AIHSP yang telah terjalin sejak tahun 2021-2024 (AIHSP, n.d.), yang merupakan salah satu bentuk kemitraan strategis yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Program *Australia–Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) adalah salah satu inisiatif bilateral yang bertujuan memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional Indonesia (DFAT *Australian Government*, n.d.). Inisiatif ini menjadi penting diteliti karena penyakit hewan zoonotik dan wabah hewan lainnya (seperti PMK dan LSD) semakin sering muncul, mengancam peternakan dan kesehatan masyarakat. Dukungan kolaborasi multi-sektor yang digalang AIHSP (pemerintah, swasta, akademisi) diharapkan mewariskan sistem ketahanan kesehatan hewan yang lebih tangguh (AIHSP, n.d.).

AIHSP dilaksanakan di 5 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (AIHSP, n.d.-b). Di tahun 2022, Jawa Tengah menjadi perhatian dikarenakan kemunculan sejumlah

penyakit ternak. Wabah PMK pertama kali muncul pada April 2022, diikuti deklarasi status wabah oleh Kementan pada pertengahan tahun tersebut (Rafsanjani et al., 2025). Setelah itu, pada akhir 2022 muncul kasus LSD di beberapa peternakan sapi perah Boyolali (Yulianto, 2022). Kasus antraks tercatat sporadis; misalnya pada 2022 ditemukan kasus di Kabupaten Wonogiri. Data Kementan menunjukkan pada 2021 ada 2 ternak antraks di Jateng, meningkat menjadi beberapa kasus di 2022 (Puspapertiwi, 2023). Sementara itu, Jawa Tengah sendiri menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang berkontribusi signifikan dalam perekonomian daerah dari produksi peternakannya. Badan Pusat Statistik Provinsi Jateng mencatat nilai produk domestik regional bruto subsektor peternakan Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp36,317 miliar (Ditjen PKH, 2022).

Melihat permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk menyampaikan riset mengenai kerja sama AIHSP dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan hewan di Jawa Tengah. Penelitian ini penting untuk menganalisis kerja sama ini dalam mencapai ketahanan kesehatan dan memberikan informasi penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran terkait peternakan dan kerjasama internasional untuk memahami dampak kerjasama terhadap perekonomian lokal dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengkaji strategi AIHSP dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan hewan di Jawa Tengah, dengan fokus pada penguatan sistem surveilans penyakit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi perumusan kebijakan pengembangan sektor peternakan dan optimalisasi kerjasama internasional di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan satu rumusan masalah yakni “Bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan kerja sama AIHSP dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan hewan di Jawa Tengah di tahun 2021-2024?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Menjelaskan permasalahan kesehatan yang menjadi ancaman bagi stabilitas perekonomian dan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan memetakan kerja sama internasional di level daerah dalam mengatasi permasalahan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2. Tujuan Khusus

Menganalisis peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan program kerja sama AIHSP untuk meningkatkan kapasitas aktor dalam menyelesaikan permasalahan hewan melalui sistem kesehatan hewan di Jawa Tengah sehingga tercapai tujuan ketahanan kesehatan di Jawa Tengah.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Akademis

1. Memberikan kontribusi empiris terhadap kajian hubungan internasional, khususnya dalam konteks kerja sama internasional di bidang kesehatan hewan dan keamanan hayati (biosecurity).
2. Menambah referensi akademik mengenai peran aktor non-negara dan program kemitraan bilateral dalam pembangunan sektor kesehatan di negara berkembang.
3. Mengembangkan pemahaman mengenai penerapan teori paradiplomasi dalam konteks kerja sama kesehatan lintas negara.
4. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji dampak kerja sama internasional terhadap sektor-sektor spesifik di tingkat lokal.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai strategi konkret yang telah dilakukan AIHSP dalam mencegah dan menangani penyakit hewan, sehingga dapat membantu peternak memahami pentingnya biosekuriti dan mendorong adopsi praktik kesehatan hewan yang lebih baik.
2. Menyediakan bahan evaluatif dan referensi akademik dalam mengembangkan studi interdisipliner antara hubungan internasional, kesehatan masyarakat veteriner, dan pembangunan daerah. Penelitian ini juga membuka ruang diskusi ilmiah tentang efektivitas model kerja sama internasional di tingkat subnasional, serta menjadi acuan untuk riset lanjutan tentang diplomasi kesehatan hewan.

3. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar analisis risiko dalam rantai pasok peternakan, khususnya yang berkaitan dengan penyakit hewan menular. Informasi ini dapat membantu meningkatkan produksi, serta memperkuat daya saing produk ternak di pasar lokal dan ekspor.
4. Menyajikan evaluasi terhadap efektivitas strategi AIHSP yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan kesehatan hewan di daerah.

1.5. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya, penulis telah meninjau beberapa penelitian terdahulu mengenai paradiplomasi, kerja sama internasional, dan kesehatan. Penelitian Windiani, Reni (2014) membahas mengenai implementasi kerjasama *Sister Province* Jawa Tengah-Queensland di bidang peternakan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan efektivitas. Meskipun kerjasama ini cukup efektif dalam hal disposisi dan sumber daya manusia, terdapat kekurangan dalam komunikasi, sumber daya finansial, dan struktur birokrasi yang menghambat efektivitasnya. Meskipun sempat menunjukkan efektivitas di awal, jumlah program yang terlaksana semakin sedikit seiring berjalannya waktu, sehingga hasil kerjasama belum memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang.

Penelitian Maharani, Elisabeth Sevina Daffa (2023). "Kajian Integrasi Konsep *One Health* dalam Penjaminan Keamanan Pangan untuk Daging Sapi" yang mengeksplorasi peluang integrasi konsep *One Health*—yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan—dalam penjaminan

keamanan daging sapi. Elemen zoonosis dan penyebaran parasit memiliki kesesuaian tertinggi dengan penjaminan keamanan daging sapi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *One Health* berpotensi menjadi strategi sistematis dalam mengatasi permasalahan pangan dan penyakit zoonotik yang mengancam keamanan pangan.

Penelitian Wulandari, Ayu Atika (2024). "Kerjasama Bilateral Indonesia dan Australia terhadap Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) pada Tahun 2022-2024 (*Bio-security*)". Studi ini meneliti kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta *Lumpy Skin Disease* (LSD) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Fokus utama penelitian adalah peran *Australia Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) dalam memberikan bantuan biosekuriti, termasuk pengiriman tenaga ahli dan vaksin, guna mendukung penanganan wabah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menghadapi tantangan kesehatan hewan.

Penelitian Puspitasarie (2022) yang berjudul "Efektivitas Program ITAC Dalam Kerjasama *Sister Province* Provinsi Jawa Tengah Dengan Queensland Tahun 2019-2021" menyimpulkan bahwa kerjasama tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program, serta manfaat kerjasama yang cenderung hanya dinikmati oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian Maulana, Ilyasa Dinta (2023). "Kerja Sama Ketahanan Pangan dalam Sektor Daging Merah dan Ternak Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership Phase 2 Periode 2019-2023". Penelitian ini membahas kerja sama bilateral Indonesia–Australia dalam sektor ketahanan pangan melalui program Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership Phase 2 periode 2019–2023. Fokus utamanya adalah mengatasi krisis daging merah dan rendahnya produksi ternak di Indonesia melalui peningkatan kapasitas peternak, penguatan rantai pasok, investasi, inovasi, serta pelatihan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor daging dari Australia dan kerja sama ini menjadi strategi penting dalam menjawab tantangan food insecurity, khususnya pada aspek ketersediaan dan akses pangan hewani.

Penulis melakukan studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tabel *state of the art* berikut menyajikan perbandingan beberapa penelitian terdahulu berdasarkan variabel-variabel kunci, seperti rumusan masalah, konsep atau teori yang digunakan, dan metode yang digunakan. Dengan adanya tabel ini, dapat diidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dibahas, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam bidang yang dikaji.

Tabel 1.1

Perbandingan State of The Art

No.	Judul, Penulis, Tahun	Isi	Hasil Penelitian
1	2	3	4
1.	Implementasi <i>Sister Province</i> Provinsi Jawa Tengah Dengan Negara Bagian Queensland Australia Di Bidang Pertanian (Windiani, R. 2014)	Rumusan masalah: 1. Bagaimana efektifitas kerjasama <i>Sister Province</i> Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia di bidang peternakan? 2. Apa Sajakah yang menjadi penghambat kerjasama <i>Sister Province</i> Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia di bidang peternakan? 3. Bagaimana prospek kerjasama <i>Sister Province</i> Provinsi Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia di bidang peternakan? Konsep: Kebijakan publik, Implementasi kebijakan, dan Efektivitas. Metode: Kualitatif	Meskipun kerjasama ini cukup efektif dalam hal disposisi dan sumber daya manusia, terdapat kekurangan dalam komunikasi, sumber daya finansial, dan struktur birokrasi yang menghambat efektivitasnya. Meskipun sempat menunjukkan efektivitas di awal, jumlah program yang terlaksana semakin sedikit seiring berjalannya waktu, sehingga hasil kerjasama belum memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang.

1	2	3	4
2	Kajian Integrasi Konsep <i>One Health</i> dalam Penjaminan Keamanan Pangan untuk Daging Sapi (Maharani, E. 2023)	Rumusan Masalah: 1. Sejauh manakah peluang dari integrasi konsep <i>One Health</i> dalam penjaminan mutu daging sapi? 2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam integrasi konsep <i>One Health</i> dalam penjaminan mutu daging sapi? 3. Strategi apakah yang tepat untuk mengintegrasikan konsep <i>One Health</i> dalam penjaminan mutu daging sapi? Konsep: <i>One Health</i> Metode: Kualitatif	Pendekatan <i>One Health</i> sangat relevan dalam menjamin keamanan pangan daging sapi. Dari 144 interaksi yang dikaji, 108 di antaranya menunjukkan keterkaitan erat antara aspek kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Integrasi konsep ini berpotensi memperkuat sistem ketahanan pangan dan pencegahan penyakit zoonotik.
3	Kerjasama Bilateral Indonesia dan Australia terhadap Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD) pada Tahun 2022-2024 (Bio-security) (Wulandari, A. 2024)	Rumusan Masalah: Mengapa Australia Dan Indonesia Memperkuat Hubungan Bilateral Dalam Menangani Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Serta <i>Lumpy Skin Disease</i> (LSD) Yang Terjadi Pada Tahun 2022-2024? Konsep: Teori Rezim Internasional dan Konsep Bio-security Metode: Kualitatif	Kerja sama bilateral melalui program AIHSP terbukti efektif dalam mendukung penanganan wabah PMK dan LSD di Indonesia, khususnya melalui penyediaan vaksin, tenaga ahli, dan penguatan sistem biosekuriti. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Australia dalam memperkuat ketahanan kesehatan hewan Indonesia pasca-2022.

1	2	3	4
4	Efektivitas Program Itac Dalam Kerjasama <i>Sister Province</i> Provinsi Jawa Tengah Dengan Queensland Tahun 2019-2021 (Puspitasarie, F. 2022)	Rumusan Masalah: Bagaimana efektivitas program pada peningkatan kerjasama <i>sister province</i> Jawa Tengah dengan Queensland dalam bidang pendidikan vokasi? Konsep: Paradiplomasi, <i>Sister City/Province</i>, Efektivitas Implementasi Program Metode: Kualitatif	Penelitian ini menyatakan bahwa kerjasama ini tidak efektif karena melibatkan peran masyarakat dalam merencanakan implementasi program dan manfaat dari adanya kerjasama hanya didominasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5	Kerja Sama Ketahanan Pangan dalam Sektor Daging Merah dan Ternak Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership Phase 2 Periode 2019-2023 (Maulana, I. 2023)	Rumusan Masalah: Bagaimana kerja sama ketahanan pangan komoditas daging merah dan ternak Dalam Kerangka <i>Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership</i> periode 2019-2023? Konsep: Teori Kerja Sama Internasional, Konsep Food Security Metode: Kualitatif	Kerja sama ketahanan pangan Indonesia–Australia melalui Red Meat and Cattle Partnership Phase 2 (2019–2023) berhasil meningkatkan kapasitas peternakan Indonesia melalui program pengembangbiakan, pelatihan, dan inovasi teknologi. Meski belum menghilangkan ketergantungan impor, kerja sama ini efektif mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional dan memperkuat ketahanan pangan di sektor daging dan ternak.

1	2	3	4
6	Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Ketahanan Kesehatan Hewan: Studi Tentang <i>Australia-Indonesia Health Security Partnership (AIHSP)</i> di Jawa Tengah	Rumusan Masalah: Bagaimana kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Australia melalui program AIHSP dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan hewan di Jawa Tengah? Konsep: Paradiplomasi dan <i>Health Security</i> Metode: Kualitatif	Peneliti akan menganalisis strategi AIHSP dalam menangani permasalahan kesehatan hewan melalui pendekatan paradiplomasi dan <i>health security</i> . Selain itu juga mengkaji peran aktif pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jawa Tengah, sebagai aktor paradiplomatik dalam sektor kesehatan hewan

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan fokus khusus pada peran kerjasama strategi AIHSP dalam konteks kesehatan hewan di tingkat subnasional melalui perspektif hubungan internasional. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji strategi AIHSP secara spesifik di Provinsi Jawa Tengah melalui lensa paradiplomasi, yang menyoroti peran aktif pemerintah daerah sebagai aktor non-tradisional dalam kerja sama internasional. Di samping itu, penelitian ini juga menempatkan AIHSP dalam kerangka kerja sama *paradiplomacy* dan ketahanan kesehatan (*health security*), dua aspek yang sebelumnya belum dianalisis secara integratif dalam konteks kesehatan hewan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang AIHSP, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis terhadap studi hubungan internasional subnasional, khususnya pada isu-isu pembangunan kesehatan global.

1.6. Kerangka Berpikir

1.6.1. Paradiplomasi

Istilah “paradiplomasi” mengacu pada keterlibatan entitas subnasional, seperti provinsi, negara bagian, atau kota, dalam hubungan internasional. Menurut Kutnezov, paradiplomasi didefinisikan sebagai "suatu bentuk komunikasi politik untuk mencapai manfaat ekonomi, budaya, politik, atau jenis manfaat lainnya yang terdiri dari tindakan mandiri pemerintah daerah dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah asing" (Kuznetsov, 2015). Paradiplomasi adalah keterlibatan unit konstituen atau wilayah subnasional dalam urusan internasional. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an yang merupakan gabungan dari "*parallel diplomacy*". Paradiplomasi mengacu pada

kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah non-sentral. Pemerintah dapat mewujudkan kepentingan dan mengembangkan daerah dalam lingkup internasional dengan menyesuaikan kepentingan nasional, membagi biaya pembangunan, dan mempersatukan sumber daya dan kekuatan dengan pihak asing (Soldatos, 1990).

Menurut Takdir Ali Mukti, paradiplomasi adalah perilaku dan kapasitas entitas sub-negara atau pemerintah daerah dalam menjalin hubungan luar negeri dengan pihak asing untuk memenuhi kepentingan spesifik mereka. Mukti juga menyatakan bahwa paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administratif yang memungkinkan aktor subnasional atau lembaga politik di bawah kendali pemerintah pusat untuk menjalankan hubungan luar negeri. Selain itu, Mukti menekankan bahwa paradiplomasi tidak berusaha mewakili kepentingan nasional secara luas, melainkan fokus pada isu-isu spesifik tanpa melanggar kedaulatan negara, dan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. (Mukti, 2013).

Berdasarkan cakupannya, Duchacek mengklasifikasikan paradiplomasi menjadi empat tipe, yaitu yang pertama *transborder regional paradiplomacy*: kerja sama antara wilayah subnasional yang berbatasan langsung. Kedua, *transregional paradiplomacy*: kerja sama antara wilayah subnasional yang tidak berbatasan langsung tetapi berada dalam kawasan yang sama. Ketiga, *global paradiplomacy*: kerja sama antara wilayah subnasional dari negara yang berbeda dan berada di kawasan yang berbeda. Keempat, *protodiplomacy*, yang digunakan

untuk menggambarkan kegiatan otoritas regional di arena internasional yang telah mengartikulasikan pesan separatis.

Menurut Lecours dalam Mukti (2015), praktek paradiplomasi yang dilakukan pemerintah daerah dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama, paradiplomasi regional yang berfokus pada tujuan ekonomi seperti perluasan pasar dan investasi. Kedua, paradiplomasi *multipurpose* yang melibatkan berbagai bidang kerja sama seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, pendidikan, dan teknologi. Ketiga, paradiplomasi kompleks yaitu melibatkan motif politik dan identitas nasional spesifik.

1. Aktor dalam Paradiplomasi (Kuznetsov, 2015)

- *Region* dianggap sebagai wilayah yang bersatu secara geografis, historis, ekonomi, linguistik atau budaya seperti Asia Tengah, Eropa Tengah dan Timur, Great Lakes atau Timur Tengah; dan di puncak pola tersebut adalah pernyataan tentang "wilayah" sebagai unit teritorial administratif suatu negara, seperti Tatarstan di Rusia, Bavaria di Jerman, atau Alberta di Kanada.
- *Regional Government* merujuk pada unit pemerintahan subnasional yang berada langsung di bawah otoritas pusat dan memiliki tingkat otonomi yang signifikan, baik secara hukum (*de jure*) maupun praktik (*de facto*). Regional government disini sebagai aktor subnasional yang memiliki otoritas atas kota dan kabupaten dalam konsep "*region*". Regional government didasarkan pada posisi struktural dan kewenangan politik, bukan ukuran populasi.

2. Kuznetsov mengidentifikasi 11 Dimensi Paradiplomasi, antara lain, dimensi konstitusional, dimensi federalis, dimensi nasionalisme, dimensi hubungan internasional, dimensi studi perbatasan (*Area/border studies*), dimensi regionalisasi/globalisasi, dimensi geopolitik dan keamanan, dimensi ekonomi global, dimensi diplomasi, dan dimensi separatisme. Penelitian ini akan secara khusus membahas dimensi diplomasi yang berfokus pada bagaimana diplomasi subnasional dapat memengaruhi domain diplomasi negara pusat klasik dan apa konsekuensi dari desentralisasi diplomasi.
3. Bentuk Institusionalisasi dari Paradiplomasi dalam buku *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs* oleh Alexander Kuznetsov menjelaskan bahwa akumulasi paradiplomasi melalui pengetahuan kualitatif tentang paradiplomasi dan juga sistematisasi informasi yang tersedia tentang fenomena ini dalam istilah kuantitatif. Generalisasi berdasarkan jumlah perjanjian bilateral, pertemuan resmi, forum internasional, jumlah kantor luar negeri, dan lain-lain dapat diimplementasikan lebih lanjut dalam tujuan penelitian untuk mengukur intensitas keterlibatan subnasional dalam hubungan internasional dan memberikan evaluasi diplomasi konstituen tidak hanya secara kualitatif, tetapi juga secara kuantitatif. Beberapa klasifikasi yang dapat digunakan antara lain:
 - a) Pembentukan kementerian atau departemen khusus regional yang bertanggung jawab atas urusan internasional unit konstituen.
 - b) Pembukaan kantor subnasional permanen di negara asing.

- c) Kunjungan resmi pemerintah daerah ke wilayah dan negara asing.
 - d) Partisipasi dalam berbagai acara internasional seperti pameran, forum, dll.
 - e) Pembentukan dan partisipasi dalam jaringan regional multilateral global dan lintas batas serta kelompok kerja mengenai masalah-masalah khusus seperti pertanian, pembangunan berkelanjutan, energi, transportasi, dll.
 - f) Partisipasi otoritas regional dalam acara internasional yang diselenggarakan oleh entitas asing dalam delegasi resmi pemerintah pusatnya.
4. Menurut Soldatos, tindakan paradiplomatik dapat dilakukan dengan empat rumus utama:
- a) *the cooperative-coordinated model* mengasumsikan keterlibatan regional dalam hubungan internasional di bawah koordinasi formal atau informal pemerintah federal.
 - b) *the cooperative joint formula* terdiri dari penyertaan formal atau informal diplomasi konstituen ke dalam kebijakan luar negeri nasional.
 - c) *the parallel- harmony model* mengasumsikan bahwa pemerintah daerah bertindak secara independen di kancah internasional, namun, pada saat yang sama, tindakan mereka selaras dan tidak bertentangan dengan urusan luar negeri nasional.
 - d) *the parallel- disharmony* terjadi ketika tindakan eksternal otoritas daerah bertentangan dengan kebijakan pemerintah nasional.

1.6.2. *Human Security*

"freedom from fear and freedom from want." *Human Security* menurut UNDP 1994) didefinisikan sebagai perlindungan manusia dari ancaman kronis (seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan) dan dari gangguan tiba-tiba dalam kehidupan sehari-hari (seperti konflik, kerusakan lingkungan, atau epidemi). UNDP. (1994). Tadjbakhsh & Chenoy (2007) mendefinisikan *Human security* sebagai pendekatan yang menempatkan individu dan komunitas sebagai referensi utama dalam analisis keamanan, alih-alih hanya negara. Mereka mendefinisikannya sebagai upaya untuk mengatasi kerentanan manusia terhadap ancaman multidimensional, baik dari negara maupun non-negara (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Pendekatan *human security* lebih menekankan keterlibatan langsung masyarakat, bersifat lintas negara, dan mendorong kerja sama yang erat antara negara dan institusi internasional dalam menjawab tantangan keamanan kontemporer (Newman, 2010).

Ada tujuh komponen keamanan manusia (*human security*) menurut UNDP (2004) yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen tersebut adalah; keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan hidup (*environment security*), keamanan personal (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), dan keamanan politik (*political security*). Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada salah satu komponen *human security*, yaitu *health security*.

a) *Health Security*

Menurut WHO (2007) "*Health security is the activities required to minimize the danger and impact of acute public health events that endanger the collective health of populations living across geographical regions and international boundaries.*" menjelaskan bahwasanya keamanan kesehatan mencakup upaya global untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kesehatan masyarakat, termasuk penyakit menular lintas negara. Pendekatan keamanan kesehatan juga berkembang dalam konteks Global Health Security Agenda (GHSA), sebuah inisiatif multilateral yang diluncurkan pada tahun 2014 oleh lebih dari 70 negara dan organisasi internasional. GHSA berfokus pada penguatan kapasitas nasional dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman penyakit menular, termasuk melalui sistem surveilans, laboratorium, dan pelatihan tenaga kesehatan (Katz et al., 2018).

- *One Health Approach Indicators*

Konsep One Health merupakan pendekatan terintegrasi dan kolaboratif yang bertujuan untuk mencapai kondisi kesehatan yang optimal bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Menurut definisi dari WHO, *One Health* adalah sebuah pendekatan terpadu yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara berkelanjutan. WHO menekankan bahwa kesehatan manusia, hewan peliharaan dan satwa liar, tumbuhan, serta ekosistem lebih luas sangat erat kaitannya dan saling bergantung satu sama lain (WHO, 2021).

Dalam konteks kesehatan global, pendekatan *One Health* memiliki peran sentral dalam mencegah dan mengatasi penyakit zoonosis, yakni penyakit menular yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia seperti COVID-19, Ebola, rabies, dan flu burung. WHO mencatat bahwa lebih dari 60% penyakit menular baru yang menyerang manusia berasal dari hewan, sehingga pendekatan ini menjadi penting dalam mencegah spillover lintas spesies yang dapat memicu krisis kesehatan publik (WHO, 2021). Selain itu, *One Health* juga diakui dan didukung oleh organisasi internasional seperti *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *United Nations Environment Programme* (UNEP), yang menyoroti bahwa aktivitas manusia seperti perusakan habitat, praktik pertanian intensif, dan perdagangan satwa liar ilegal telah meningkatkan risiko munculnya penyakit lintas spesies. Oleh karena itu, *One Health* menjadi kerangka kerja yang tidak hanya mencakup pencegahan penyakit, tetapi juga deteksi dini, kesiapsiagaan, respon, dan manajemen risiko kesehatan secara holistik (FAO, WHO, UNEP & WOA, 2022).

FAO menggunakan beberapa indikator untuk menganalisis kasus, antara lain sebagai berikut;

- a. Koordinasi dan Tata Kelola Lintas Sektor (kesehatan manusia, hewan, lingkungan)
- b. Pengawasan dan Deteksi Dini (*Surveillance and Early Detection*)
- c. Kapasitas Respons Wabah Terintegrasi
- d. Kapasitas laboratorium lintas sektor

1.7. Operasionalisasi Konsep

1.7.1. Definisi Konsep

1. Paradiplomasi

paradiplomasi didefinisikan sebagai "suatu bentuk komunikasi politik untuk mencapai manfaat ekonomi, budaya, politik, atau jenis manfaat lainnya yang terdiri dari tindakan mandiri pemerintah daerah dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah asing" (Kuznetsov, 2015).

2. *One Health*

Kegiatan yang diperlukan baik secara proaktif maupun reaktif untuk meminimalkan bahaya dan dampak dari peristiwa yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah geografis dan batas-batas internasional (WHO, 2007).

1.7.2. Definisi Operasional

1. Paradiplomasi

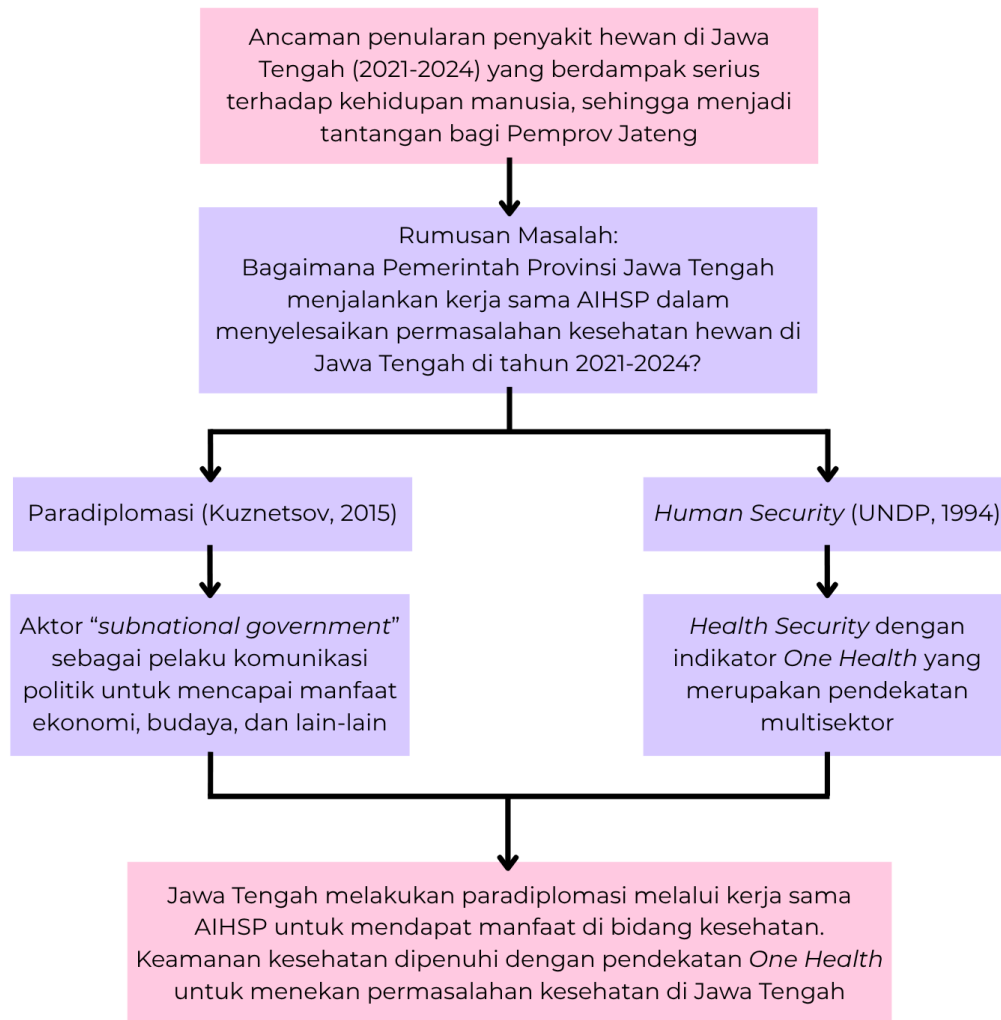
Dalam penelitian ini, paradiplomasi dioperasionalkan sebagai keterlibatan aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai aktor subnasional dalam menjalin kerja sama internasional non-tradisional dengan *Australian-Indonesian Health Security Partnership* (AIHSP) pada tahun 2021–2024, guna menyelesaikan permasalahan kesehatan hewan melalui pendekatan *cooperative joint formula*. Paradiplomasi ini diwujudkan melalui partisipasi formal dalam perencanaan dan pelaksanaan program, penguatan kelembagaan daerah di bidang kerja sama internasional, koordinasi lintas sektor dengan aktor nasional dan internasional, serta

pencapaian hasil konkret dalam bentuk dokumen kerja sama, proyek kesehatan hewan berbasis *One Health*, dan peningkatan kapasitas daerah dalam diplomasi teknis tanpa bertentangan dengan kebijakan luar negeri nasional.

2. *One Health*

Dalam penelitian ini, *One Health approach* dioperasionalkan sebagai pendekatan kolaboratif lintas sektor yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam upaya mencegah serta menangani penyakit zoonotik di Jawa Tengah melalui kerja sama AIHSP pada periode 2021–2024. Pendekatan ini diwujudkan melalui koordinasi antara dinas terkait (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup), penerapan surveilans terpadu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan zoonosis, penerapan biosekuriti di peternakan, integrasi sistem data kesehatan manusia dan hewan, serta edukasi lintas sektor kepada masyarakat. Keberhasilan pendekatan ini diukur dari efektivitas sinergi lintas sektor dalam menurunkan kasus penyakit zoonotik dan memperkuat ketahanan kesehatan di tingkat provinsi.

1.7.3. Bagan Alur Kerangka Berpikir



1.8. Argumen Penelitian

Paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama dengan *Australia Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP) mencerminkan peran strategis aktor subnasional dalam menjawab tantangan kesehatan yang menjadi ancaman terhadap kehidupan manusia di Jawa Tengah. Dalam menghadapi ancaman penyakit PMK, LSD, dan penyakit zoonosis, Jawa Tengah memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat sistem

ketahanan kesehatan daerah dengan pendekatan *One Health*. Melalui AIHSP, Jawa Tengah memperoleh berbagai manfaat seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem surveilans dan laboratorium, serta dukungan kelembagaan dalam mendeteksi dan merespons penyakit menular secara lebih cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa melalui paradiplomasi, pemerintah daerah tidak hanya mampu menjalin kerja sama internasional yang relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga memperkuat keamanan kesehatan secara berkelanjutan.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan penelitian kualitatif sebagai metodenya. Metode kualitatif adalah pendekatan untuk menggali dan memahami makna yang berkaitan dengan masalah sosial (Creswell, 1994). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam. Sesuai dengan pandangan Sukmadinata (2006), penelitian deskriptif dapat menggali fenomena alami maupun buatan manusia. Dalam konteks ini, penelitian akan menyajikan gambaran detail mengenai kerjasama *Australia Indonesia Health Security Partnership* (AIHSP).

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam. Sesuai dengan pandangan Sukmadinata (2006), penelitian deskriptif dapat menggali fenomena alami maupun buatan manusia. Dalam konteks ini, penelitian akan menyajikan gambaran detail mengenai kerjasama AIHSP.

1.9.2. Situs Penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat di mana peneliti mengumpulkan data atau informasi yang relevan untuk memahami kondisi nyata dari subjek penelitian (Nasution, 2003). Dalam penelitian ini, lokasi studi dipilih di Provinsi Jawa Tengah.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, item, atau aktivitas yang memiliki atribut, sifat, atau nilai tertentu yang akan diteliti untuk mendapatkan kesimpulan (Sugiyono, 2008). Pada penelitian ini, penulis memilih Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu jenis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal yang membentuk teks berupa rangkaian kata, frasa, dan kalimat, bukan dalam bentuk angka (Muhadjir, 1996).

1.9.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016), adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta dari data, laporan, dan arsip Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu, data sekunder, menurut Hasan (2002), adalah informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, sumber perpustakaan, penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melalui *library research* atau riset kepustakaan. Teknik *library research* adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada kegiatan belajar dan pemahaman data yang berasal dari buku, teori, catatan, dan dokumen.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses untuk menelaah data dan menarik kesimpulan yang relevan melalui penerapan metode analisis tertentu (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data secara deduktif. Analisis deduktif adalah pendekatan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum dan diarahkan menuju kesimpulan yang lebih spesifik (Creswell, 2013). Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu mengemukakan teori-teori yang relevan, lalu menganalisis data dan fakta yang telah dikumpulkan berdasarkan kerangka teori tersebut.

1.9.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Mosley (2008) mendefinisikan kualitas data sebagai tingkat akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan konsistensi data. Dalam penelitian ini, penulis

berupaya memperoleh data yang lengkap, dapat dipercaya, dan relevan dengan periode fenomena yang diteliti.